

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Perbendaharaan Negara*
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang *Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang *Pengelolaan Barang Milik Daerah*
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa*
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia*
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang *Pengelolaan Barang Milik Daerah*
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 44 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo Secara Elektronik*
- Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2012 tentang *Sistem dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Wonosobo Tahun 2012*

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2018 tentang *Uraian Tugas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo*

Arrowsmith, S. (2010). Horizontal Policies in Public Procurement: A Taxonomy. *Journal Of Public Procurement*.

Asyari, S. I. (1983). *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.

Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 150.

Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah Melalui pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 2.

Beridiansyah. (2017). Analisis Yuridikasi Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi. *Integritas*, 79.

Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. (2020). *Manajemen BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan*. Retrieved from Manajemen BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan: [www.romadan.kemenkeu.go.id/News/Detail/259](http://www.romadan.kemenkeu.go.id/News/Detail/259)

BPK. (2018). *sultra.bpk.go.id*. Retrieved from [sultra.bpk.go.id](http://sultra.bpk.go.id): <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Perencanaan-Kebutuhan-Dalam-Pengadaan-Barang-dan-Jasa-di-Pemerintah-Daerah>

Disdagkopukm. (2022). *disdagkopukm.wonosobokab.go.id*. Retrieved Maret 4, 2022, from [disdagkopukm.wonosobokab.go.id](http://disdagkopukm.wonosobokab.go.id): [https://disdagkopukm.wonosobokab.go.id/postings/details/1031315/UPT\\_PASAR\\_INDUK\\_WONOSOBO.HTML](https://disdagkopukm.wonosobokab.go.id/postings/details/1031315/UPT_PASAR_INDUK_WONOSOBO.HTML)

DJPK. (2014). *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Fathin, F. A. (2021). *Implementasi Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Pasar oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Studi Kasus Pasar Banjaran Kabupaten Tegal)*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Febriani, Y. (2021). *Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Tingkat Dasar*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Fitriana, I. (2014). *KOMPAS.com*. Retrieved from KOMPAS.com: <https://regional.kompas.com/read/2014/12/22/20313991/Pasar.Wonosobo.Terbakar.Lagi.Ribuan.Pedagang.Merugi>
- Heriani, F. N. (2020, Oktober). *15 Isu yang Menimbulkan Sengketa Kontrak di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com>
- Jo, B., Keast, R., & Furneaux, C. (2016). *Social Procurement and New Public Governance*. London: Routledge.
- Lestyowati, J. (2018). Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Kerja. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 669.
- Mangitung, D. M. (n.d.). Kerangka Konsep Pengadaan Jasa Kontraktor. *SAMRTek*, 244.
- Mulyono, E., Martoto, & Listiani, E. I. (2013). Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010: Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN*.
- Nursetyo, G. (n.d.). Tinjauan Manajemen Pengadaan Jasa Konstruksi.
- Pemerintah Kabupaten Wonosobo. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021.  
Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

PPID Kabupaten Wonosobo. (2018, Agustus). *ppid.wonosobokab.go.id*. Retrieved from [ppid.wonosobokab.go.id:  
https://ppid.wonosobokab.go.id/postings/details/1030734/-](https://ppid.wonosobokab.go.id/postings/details/1030734/)

Purwanto, S. S. (2008). Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E-Procurement. *Teknik Sipil*, 44.

Puspawati, A. A. (2016). Penerapan New Public Management (NPM) di Indonesia. *Publisia*, 38.

Puspawati, A. A. (2016). Penerapan New Public Management (NPM) di Indonesia (Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik). *Publisia*, 38.

Rizqiana, D. I. (2018). *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Perkantoran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dengan Sewa*. Tangerang Selatan.

Sayidah, N., Mulyaningtyas, A., & Winedar, M. (2015). Implementasi Konsep New Public Management Di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. *Akuntansi dan Auditing*, 39.

UNODC. (2020, Desember). *United Nation Regional Office for Southeast Asia and Pasific*. Retrieved from United Nation Regional Office for Southeast Asia and Pasific: <https://www.unodc.org/roseap/en/what-we-do/anti-corruption/topics/2020/public-procurement-reform-indonesia.html>

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.